



**KANTOR  
STAF PRESIDEN**  
(EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT)

# **Perlindungan Sosial Kelanjutan: Reformasi Program Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT)**

Kedeputian III Bidang Perekonomian KSP  
Desember 2021

- Penuaan penduduk (*population ageing*) yang dihadapi secara global merupakan salah satu hasil pembangunan, seperti peningkatan kesehatan, gizi, perbaikan akses sanitasi, pendidikan dan teknologi.
- Lanjut Usia di Indonesia berjumlah lebih kurang **26,4 juta orang** atau **9,78% dari total penduduk pada tahun 2020**.
- Menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045, pada tahun 2024, penduduk Lanjut Usia diperkirakan mencapai 12,6% dari total penduduk atau sekitar 34 juta orang.
- Peningkatan jumlah penduduk Lanjut Usia dapat berdampak positif apabila penduduk tersebut berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif.

# Identifikasi Permasalahan

## Struktur Ketenagakerjaan dan Kepesertaan BPJS TK

- Komposisi pekerja di Indonesia **didominasi oleh sektor informal (60,47%)** yang mayoritas tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan masuk kategori miskin atau rentan.
- Data per April 2021 menunjukkan total kepesertaan BPJS TK adalah **54,04% (48,64 juta pekerja)** dengan **kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) masih 8,42%**.

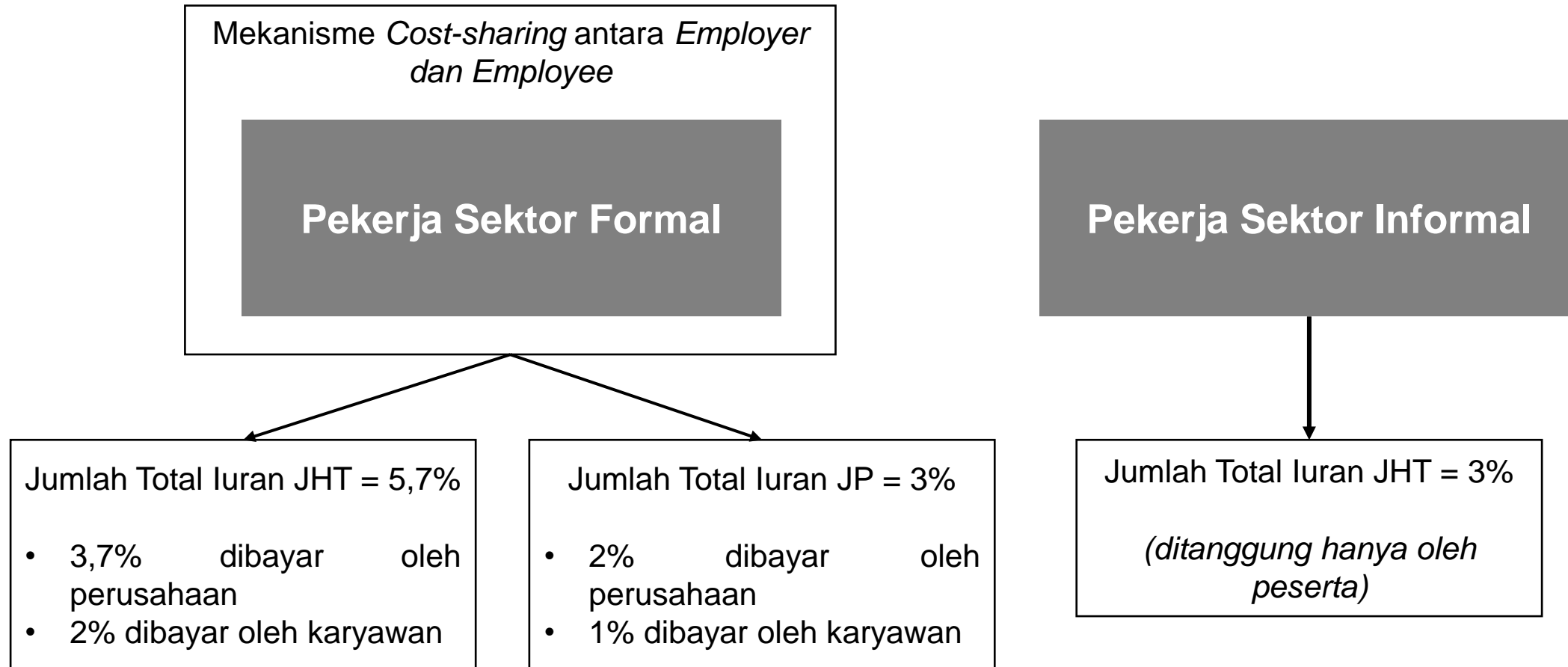
Berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2013 Program **Jaminan Pensiun (JP) belum mencakup sektor informal/ Bukan Penerima Upah (BPU)**.

**Respon Regulasi:** Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan

Strategi 1, Arah Kebijakan 1.1.1, Kegiatan 1:

Pengembangan Skema Jaminan Pensiun yang Sesuai dengan Karakteristik Pekerja Informal

# Perbedaan Mekanisme Iuran antara Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah



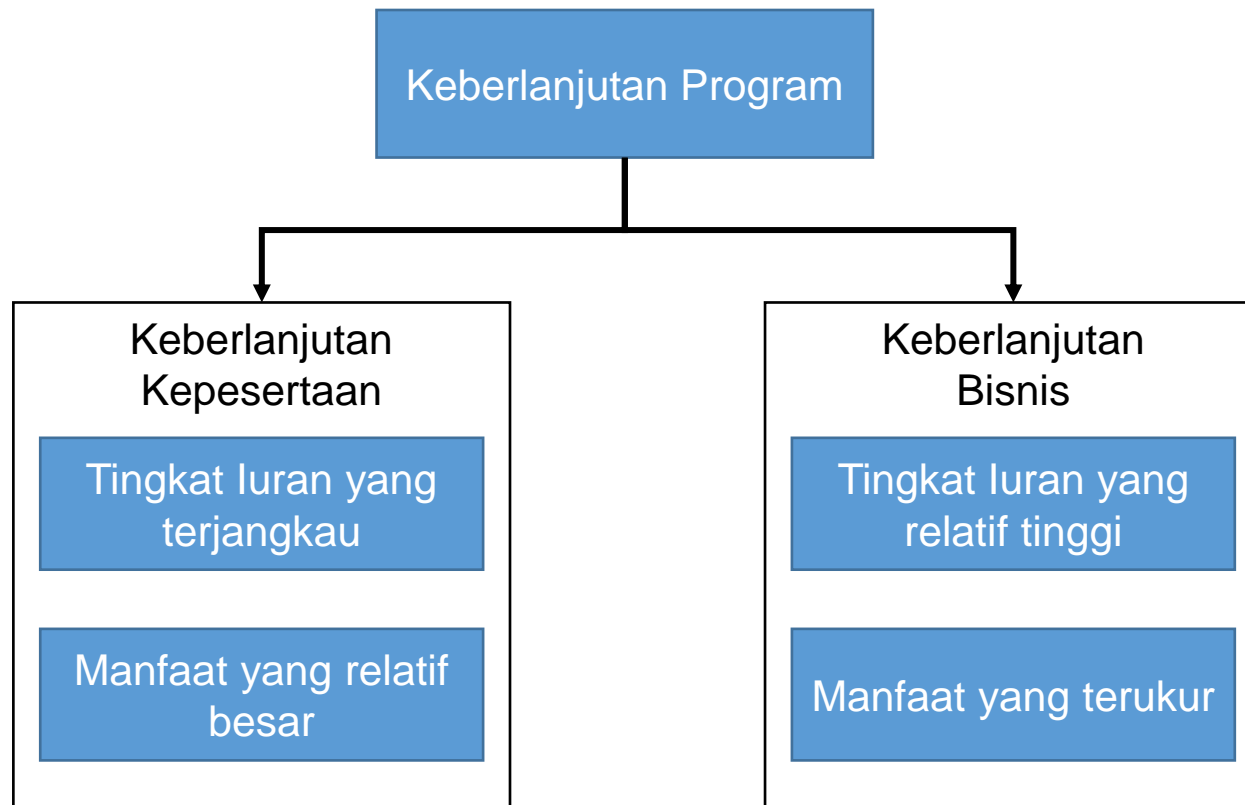
# Relevansi Tingkat Manfaat dengan Kondisi Ekonomi

Formulasi tingkat manfaat Program JP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 memperhitungkan variabel:  
**Inflasi tahunan nasional dan Produk Domestik Bruto tahunan**

Basis perhitungan berdasarkan variabel tahunan **tidak dapat meng-capture aspek siklikal bulanan**. Hal tersebut dapat menurunkan besaran manfaat secara riil pada periode tertentu.

Basis perhitungan berdasarkan variabel nasional **tidak dapat meng-capture aspek spesifik dari kondisi perekonomian daerah** di mana suatu daerah mungkin saja memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

# Tantangan Keberlanjutan Program Jaminan Pensiun dan Hari Tua



Mengenai aspek keberlanjutan program, terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1) keberlanjutan kepesertaan aktif dan keberlanjutan bisnis.

Yang menjadi tantangan adalah kedua hal tersebut seringkali berlawanan di mana:

1. Keberlanjutan kepesertaan aktif membutuhkan tingkat iuran terjangkau dan manfaat yang relatif besar; dan
2. Keberlanjutan bisnis membutuhkan tingkat iuran yang relatif tinggi dengan manfaat pada tingkat tertentu

# Fokus Reformasi



# Fokus Reformasi Program JP dan JTH

<b>Cakupan</b> “Pekerja Sektor Informal”	<b>Kecukupan</b> “Relevansi Tingkat Manfaat dengan Kondisi Peserta”
<b>Kepastian</b> “Mekanisme Iuran”	<b>Keberlanjutan</b> “Keberlanjutan Kepesertaan dan Fisibilitas Aspek Bisnis”

- **Aspek Cakupan: Fokus Cakupan Peserta Pekerja Sektor Informal**

Pengembangan Skema Jaminan Pensiun yang Sesuai dengan Karakteristik Pekerja Informal berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, Strategi 1, Arah Kebijakan 1.1.1, Kegiatan 1.

- **Aspek Kecukupan: Relevansi Tingkat Manfaat dengan Kondisi Peserta**

Setidaknya formulasi tingkat manfaat dapat memperhitungkan aspek spesifik regional guna mengoptimasi tingkat manfaat secara riil sesuai dengan kondisi peserta.

- **Aspek Kepastian: Mekanisme Iuran**

Perlu pengkajian untuk mengeksplorasi dan memastikan mekanisme *cost-sharing* atau mekanisme lainnya yang dimungkinkan untuk peserta PBU/pekerja sektor informal.

- **Aspek Keberlanjutan: Keberlanjutan Kepesertaan dan Fisibilitas Aspek Bisnis**

Perlu adanya pendalaman terkait mekanisme, jumlah iuran, dan manfaat yang dapat menyeimbangkan aspek keberlanjutan kepesertaan dan fisibilitas bisnis. Sebagai contoh, mekanisme iuran yang diadakan perminggu guna menyesuaikan dengan pola *cash flow* pekerja sektor informal.

**Terima Kasih**

*Kedeputian III Bidang Perekonomian  
Kantor Staf Presiden*